

**PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELALUI
KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAKARTA
UTARA**

Alvionita Safitri Anwar Awi^{1*}

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*alvionitasafitrii05@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui berbagai kegiatan nyata. Permasalahan yang diangkat adalah masih rendahnya pemahaman ormas terhadap regulasi serta lemahnya koordinasi antarormas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Kesbangpol Jakarta Utara berperan sebagai fasilitator, regulator, dan mediator melalui seminar, rapat koordinasi, forum diskusi, dan forum Forkopimko. Pembinaan berdampak pada meningkatnya komitmen ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Disimpulkan bahwa pembinaan ormas oleh Kesbangpol telah berhasil membangun kesadaran kolektif dan kemandirian sosial ormas sebagai mitra pemerintah.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol, Pembinaan Ormas, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Utara

ABSTRACT

This community service study examines the role of the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) of North Jakarta City Administration in fostering community organizations (ormas) through concrete activities. The problems addressed include the low level of organizational understanding of regulations and weak inter-organizational coordination. A qualitative descriptive approach was used through observation and documentation. Results show that Kesbangpol North Jakarta acts as facilitator, regulator, and mediator through seminars, coordination meetings, discussion forums, and the Forkopimko forum. Outcomes include increased commitment to maintaining public order and more active participation in regional development. It is concluded that organizational development by Kesbangpol has successfully built collective awareness and social independence of community organizations as government partners.

Keywords: Community Organization; Kesbangpol; Organizational Development; Community Empowerment; North Jakarta

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada era Reformasi. Ormas dipandang sebagai wadah partisipasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi, memperkuat persatuan, serta mendukung stabilitas sosial dan politik. Dalam sistem demokrasi, keberadaan ormas menjadi elemen penting dalam membangun keterlibatan warga negara dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Oleh

karena itu, pembinaan terhadap ormas menjadi kebutuhan mendasar agar keberadaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan nasional (Santoso, C. W., & Harefa, H, 2015).

Organisasi masyarakat diciptakan oleh rakyat untuk membantu pemerintah mendirikan bangsa sesuai dengan Pancasila. Ormas dibentuk oleh individu atau kelompok atas kesamaan dengan sukarela tanpa tujuan komersial. Ormas sebagai sarana partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi negara untuk melaksanakan dan sebagai agen pembangunan.

Dalam konteks tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial, termasuk melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan. Pembinaan ini bertujuan agar ormas dapat berperan secara positif, konstruktif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemahaman ormas terhadap regulasi, lemahnya koordinasi antar ormas, serta potensi konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan. Kondisi ini menuntut peran aktif Kesbangpol dalam melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan dan terarah (Ihsan, 2025).

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Utara adalah melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, sosialisasi, forum dialog, dan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman ormas terhadap peraturan perundang-undangan, memperkuat nilai persatuan dan kesatuan, serta mendorong partisipasi ormas dalam menjaga kondusivitas wilayah. Jakarta Utara sebagai wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi menjadikan kegiatan pembinaan ormas sebagai instrumen penting dalam mencegah konflik sosial dan menjaga harmoni masyarakat (Dewi, 2024).

State of the art menunjukkan bahwa kajian mengenai pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyoroti peran Kesbangpol dalam pendataan, pengawasan, serta pembinaan ideologi kebangsaan terhadap ormas. Namun, kajian yang memfokuskan pada peran Kesbangpol dalam pembinaan ormas melalui kegiatan-kegiatan konkret di wilayah Jakarta Utara masih jarang dilakukan (Fadillah, R., Sufianti, A., & Novira, 2025). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk menganalisis peran Kesbangpol Jakarta Utara dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta mengidentifikasi kontribusi pembinaan tersebut bagi penguatan kehidupan berdemokrasi dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

METODE

Tempat dan Waktu

Kegiatan pembinaan dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, mencakup kantor Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara dan berbagai tempat penyelenggaraan forum koordinasi. Kegiatan berlangsung secara berkala sepanjang tahun, dengan beberapa kegiatan besar tercatat pada tahun 2024-2025.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar dan aktif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, serta aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses pembinaan ormas.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi: (1) Observasi partisipatif terhadap kegiatan seminar, sosialisasi, rapat koordinasi, dan forum dialog yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Jakarta Utara; (2) Dokumentasi kegiatan berupa foto dan materi presentasi sebagai bukti empiris pelaksanaan pembinaan; (3) Analisis data kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Dalam praktiknya, Kesbangpol Jakarta Utara menerapkan pendekatan pembinaan yang menekankan komunikasi, edukasi, dan koordinasi.

A. Kegiatan 1: Koordinasi Lintas Lembaga melalui Forum Forkopimko

Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang diselenggarakan oleh Suku Kesbangpol Jakarta Utara merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bersifat koordinatif dan strategis. Dalam kegiatan ini, Kesbangpol berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta organisasi kemasyarakatan untuk membahas berbagai isu aktual yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan politik di wilayah Jakarta Utara. Pembinaan melalui Forkopimko tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai media penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antaraktor. Kesbangpol memfasilitasi penyampaian informasi terkait isu-isu strategis seperti keamanan wilayah, potensi intoleransi, serta ancaman konflik sosial, sehingga seluruh pihak, termasuk ormas, memiliki pemahaman yang sama dalam merespons dinamika yang terjadi di masyarakat.



Gambar 1 Forum FORKOPIMKO



Gambar 2 Forum FORKOPIMKO

B. Kegiatan 2: Pengawasan Terpadu dan Edukatif terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang diselenggarakan oleh Suku Kesbangpol Jakarta Utara merupakan bentuk pembinaan yang bersifat pengawasan terpadu sekaligus edukatif. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol berperan dalam mengoordinasikan berbagai unsur pemerintah untuk membahas pengawasan dan pembinaan ormas serta upaya mitigasi potensi gesekan sosial di masyarakat. Pembinaan ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan kemitraan. Ormas diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah yang perlu dibina agar tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan nilai-nilai Pancasila.



Gambar 2 Rapat Koordinasi Terhadap Ormas

C. Keberhasilan: Kontribusi Ormas Setelah Pembinaan Kesbangpol Jakarta Utara

Berdasarkan hasil telaah terhadap sumber berita resmi media pemerintah, khususnya ANTARA News, kegiatan pembinaan dan koordinasi yang melibatkan Suku Kesbangpol Jakarta Utara telah menghasilkan sejumlah kontribusi nyata dari organisasi kemasyarakatan. Salah satu hasil paling menonjol adalah deklarasi komitmen ormas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam kegiatan silaturahmi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara dengan perwakilan ormas pada September 2025, para tokoh ormas secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi menjaga lingkungan dari potensi aksi anarkis serta menolak segala bentuk kekerasan.



Gambar 3 Forum Diskusi

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Selain kontribusi di bidang keamanan, hasil pembinaan juga terlihat dari meningkatnya partisipasi ormas dalam mendukung program pembangunan daerah. Pemerintah Kota Jakarta Utara secara resmi mendorong ormas untuk berperan aktif dalam membantu mengatasi persoalan kota serta menyukseskan agenda pembangunan. Dengan demikian, ormas tidak hanya berperan reaktif terhadap permasalahan sosial, tetapi juga proaktif dalam mendukung solusi pembangunan (ANTARA News, 2025).

Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment), pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Utara dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas sosial masyarakat. Pembinaan ini telah menghasilkan: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan ormas; (2) partisipasi aktif ormas dalam berbagai agenda sosial dan pembangunan daerah; dan (3) munculnya kesadaran kolektif ormas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial secara mandiri (Ife & Tesoriero, 2008).

D. Kegiatan 3: Seminar dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Selain kegiatan koordinatif dan pengawasan, Kesbangpol Jakarta Utara juga menyelenggarakan seminar dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai bentuk pembinaan yang bersifat edukatif. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota ormas terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan. Materi yang disampaikan dalam seminar mencakup: (1) regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan dan kegiatan ormas, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahannya; (2) peran strategis ormas dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah; serta (3) batas-batas etis dalam aktivitas ormas agar tidak berbenturan dengan kepentingan umum maupun mengarah pada tindakan anarkis.

Pendekatan sosialisasi yang digunakan bersifat dialogis dan partisipatif, di mana peserta dari kalangan ormas diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Simatupang (2023) bahwa komunikasi dua arah antara Kesbangpol dan ormas merupakan kunci keberhasilan pembinaan kebangsaan yang berkelanjutan. Melalui seminar ini, ormas tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi turut diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki kontribusi dalam perumusan agenda kebangsaan di tingkat lokal. Dampak dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan ormas terhadap regulasi, berkurangnya konflik antara ormas, serta terbentuknya kesepahaman bersama dalam menyikapi isu-isu sensitif di masyarakat (Fadillah, R., Sufianti, A., & Novira, 2025).

E. Analisis Peran Kesbangpol sebagai Fasilitator, Regulator, dan Mediator

Secara keseluruhan, hasil pengamatan terhadap berbagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Jakarta Utara menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan tiga peran utama secara simultan, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan mediator. Sebagai fasilitator, Kesbangpol menyediakan ruang pertemuan, forum dialog, dan wahana koordinasi yang memungkinkan ormas berinteraksi secara konstruktif dengan pemerintah daerah maupun sesama ormas. Sebagai regulator, Kesbangpol memastikan kepatuhan ormas terhadap regulasi yang berlaku, meliputi proses pendataan, pendaftaran, dan pengawasan kegiatan ormas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Dewi, 2024). Sebagai mediator, Kesbangpol berperan dalam meredam potensi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan antar ormas maupun antara ormas dan pemerintah, serta menjembatani komunikasi agar setiap pihak dapat memahami perspektif satu sama lain.

Ketiga peran tersebut saling melengkapi dan berjalan secara integratif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Temuan ini sejalan dengan kajian Ihsan (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan ormas tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif semata, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pemerintah dalam membangun kepercayaan, mendorong partisipasi, serta menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Kesbangpol Jakarta Utara telah membuktikan bahwa pembinaan ormas yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah (Santoso, C. W., & Harefa, H, 2015).

F. Hambatan dan Tantangan dalam Pembinaan Ormas

Meskipun Kesbangpol Jakarta Utara telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menyelenggarakan pembinaan ormas, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang masih perlu diatasi secara sistematis. Hambatan pertama adalah heterogenitas karakteristik ormas yang terdaftar di Jakarta Utara. Wilayah ini memiliki jumlah ormas yang cukup besar dengan latar belakang ideologi, kepentingan, dan basis massa yang beragam, sehingga pendekatan pembinaan yang bersifat seragam tidak selalu efektif. Ormas berbasis keagamaan, etnis, profesi, dan kepemudaan memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda, sehingga Kesbangpol dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di lingkungan Suku Kesbangpol Jakarta Utara. Beban kerja yang tinggi disertai dengan jumlah personel yang terbatas menyebabkan tidak semua ormas dapat dijangkau secara intensif dalam setiap siklus pembinaan. Akibatnya, sebagian ormas yang berpotensi menimbulkan konflik sosial tidak mendapatkan perhatian pembinaan secara tepat waktu. Tantangan ketiga adalah rendahnya tingkat partisipasi pengurus ormas dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, terutama ormas-ormas yang belum memiliki struktur kepengurusan yang kuat dan stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya

mekanisme insentif atau pendekatan khusus untuk mendorong keterlibatan aktif ormas dalam setiap forum pembinaan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol (Ihsan, 2025).

Selain hambatan internal, terdapat pula tantangan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, yaitu maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial yang kerap memperkeruh hubungan antara ormas dan pemerintah. Isu-isu sensitif yang berkembang di ruang digital sering kali memicu reaksi berlebihan dari kalangan ormas sebelum ada klarifikasi resmi dari pemerintah. Hal ini menuntut Kesbangpol untuk tidak hanya aktif di forum-forum tatap muka, tetapi juga memperluas jangkauan pembinaan melalui platform digital guna merespons dinamika informasi secara lebih cepat dan akurat (Burhannudin Al-Butary, A. S., 2022).

G. Rekomendasi Penguatan Pembinaan Ormas oleh Kesbangpol Jakarta Utara

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penguatan pembinaan ormas oleh Kesbangpol Jakarta Utara ke depan. Pertama, perlu dikembangkan sistem pendataan dan pemetaan profil ormas yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini akan memudahkan Kesbangpol dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap ormas, memantau perkembangan kegiatan ormas secara real-time, serta mendeteksi dini potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Penerapan sistem informasi manajemen ormas yang terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan secara signifikan.

Kedua, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan Kesbangpol melalui penambahan tenaga fungsional yang memiliki kompetensi dalam bidang sosial kemasyarakatan, komunikasi publik, dan manajemen konflik. Peningkatan kapasitas ini penting agar Kesbangpol tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dapat berperan sebagai konsultan dan fasilitator yang efektif dalam proses pembinaan ormas. Ketiga, pembinaan ormas perlu diperluas ke ranah digital dengan memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai media komunikasi dan sosialisasi. Langkah ini akan memperluas jangkauan pembinaan kepada ormas-ormas yang memiliki keterbatasan untuk hadir dalam forum tatap muka, sekaligus mempercepat distribusi informasi regulasi dan kebijakan pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan (Sugiyono, 2020).

Keempat, perlu dikembangkan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terstruktur untuk mengukur dampak pembinaan secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan peserta kegiatan, pemantauan indikator konflik sosial, serta kajian berkala terhadap tingkat kepatuhan ormas terhadap regulasi yang berlaku. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar perbaikan dan pengembangan program pembinaan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Kelima, Kesbangpol perlu mendorong terbentuknya forum komunikasi antar-ormas yang bersifat mandiri dan berkelanjutan, sehingga ormas dapat saling bertukar informasi, menyelesaikan perbedaan secara internal, dan

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

membangun jaringan kolaborasi tanpa harus selalu bergantung pada inisiatif pemerintah. Model pembinaan yang demikian akan mendorong terwujudnya masyarakat sipil yang matang, mandiri, dan berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan daerah (Ife & Tesoriero, 2008).

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Jakarta Utara mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola ormas yang baik (*good organizational governance*). Pembinaan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, dan penguatan nilai kebangsaan, merupakan investasi jangka panjang dalam membangun fondasi masyarakat sipil yang kuat di wilayah Jakarta Utara. Keberhasilan pembinaan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial dan politik jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter ormas yang adaptif, responsif, dan berdedikasi tinggi terhadap kepentingan masyarakat luas (Meleong, L. J., 2017).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa Kesbangpol Jakarta Utara telah menjalankan perannya secara cukup efektif dalam membina organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan nyata yang bersifat dialogis dan kolaboratif. Bentuk pembinaan tersebut meliputi pelaksanaan seminar, sosialisasi, rapat koordinasi, forum diskusi, serta keterlibatan dalam forum lintas lembaga seperti Forkopimko dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Kesbangpol berperan sebagai fasilitator, regulator, dan mediator dalam membangun komunikasi, meningkatkan pemahaman regulasi, serta mencegah potensi konflik sosial di wilayah Jakarta Utara.

Pembinaan yang dilakukan terbukti mampu menciptakan ruang interaksi dua arah antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya komitmen ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menolak tindakan anarkis, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah. Kesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang aktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Disarankan agar kegiatan pembinaan serupa terus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak ormas dan memperluas keterlibatan ormas dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhannudin Al-Butary, A. S. (2022). Peran Ekonomi Ormas Islam di Indonesia, Sebuah Studi Literatur. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5(1), 17-37.
- Dewi, L. K. (2024). Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. *Jurnal Stie Bengkulu: Commite to Administration for Education Quality*, 10(1), 97-106.

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

- Fadillah, R. S. (2025). Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pengawasan Melalui Kegiatan Safari Ormas oleh Badan Kesbangpol Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(2).
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalisation* (3rd ed). Sydney: Pearson Education Australia.
- Ihsan, H. N. (2025). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas. *Jurnal Publik*, 16(1), 1-12.
- Meleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- News, A. (2025, Mei 22). Ormas Jakarta Utara Diminta Beri Kontribusi Atasi Persoalan Kota. Diambil kembali dari ANTARA News.
- Santoso, C. W., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*.
- Simatupang, M. A. (2023). Dinamika Komunikasi Kesbangpol dan Ormas Islam dalam Membangun Kesadaran Kebangsaan di Kota Medan. *Islam & Contemporary Issues*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.